**MODEL PENGEMBANGAN RUMAH PINTAR PEMILU**

**SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK BERKELANJUTAN**

**BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

**Oleh :**

**Al Rafni, Suryanef**

**alrafni@fis.unp.ac.id** **; suryanef@fis.unp.ac.id**

**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang ;**

**A. Pendahuluan.**

 Salah satu hal yang mempengaruhi tingkat kemelekwacanaan masyarakat terhadap politik dan sekaligus menentukan partisipasi dalam memilih adalah bagaimana masyarakat diedukasi menjadi pemilih yang cerdas. Pemilu yang berkualitas mensyaratkan adanya pemilih yang cerdas dan kritis. Hal tersebut akan teroenuhi jika pemilih melek politik. Oleh karena itu diperlukan proses pendidikan politik yang intensif, berkelanjutan serta terprogram agar dapat meningkatkan kualitas pemilih sekaligus kualitas kehidupan berdemokrasi. Selama ini proses pendidikan politik yang dilakukan oleh banyak pihak termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, atau pun pemerintahan daerah belum tersusun secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan (Al Rafni dan Suryanef, 2016)..

 Kehadiran rumah pintar pemilu (RPP) sebagai salah satu program prioritas nasional yang digulirkan oleh KPU sejak tahun 2016 lalu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih, masyarakat umum dan sarana untuk melakukan edukasi materi-materi demokrasi dan khususnya tentang kepemiluan. Program RPP ini dimulasi dengan pilot proyek pada KPU provinsi dan 18 KPU kabupaten/kota. Pada tahun 2016 dilanjutkan pada 10 KPU provinsi dan diharapkan pada tahun 2018 ini seluruh provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia sudah memiliki RPP. Dengan demikian kelak aka nada 327 RPP di seluruh Indonesia.

 Dalam pedoman penyelenggaraan RPP dijelaskan bahwa tujuan umum RPP adalah : (1) untuk meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kuantitas maupun kualitas ; dan (2) menjadi pusat informasi kepemiluan. Sementara itu tujuan khusus adalah mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara meningkatkan pemahaman esensi dan urgensi demokrasi serta menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian RPP memiliki arti penting dalam upaya membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kehidupan berdemokrasi terutama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

RPP yang didirikan di seluruh provinsi, kabupaten/kota sejatinya menjadi sarana pendidikan politik yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal apabila dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi masyarakat. Beberapa temuan dari evaluasi pilot proyek RPP menurut Sigit Joyowardono (Kepala Biro Teknis dan Humas KPU RI) pada acara Rakornas RPP tanggal 19-21 Mei 2016 di Bali, perlu ditingkatkan aktivitas pendidikan pemilih sebagai substansi pendidikan demokrasi dalam RPP dan demikian juga dengan sumberdaya yang mengelola RPP. Disamping itu juga terungkap tidak tercapainya target tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu kepala daerah serentak 2015 (rata-rata tingkat partisipasi hanya 69,09%), serta sarana dan prasarana RPP yang belum maksimal di sebagian besar daerah yang menjadi pilot proyek. Temuan lain juga mengungkapkan pentingnya program-program edukasi politik yang terencana, terukur, berkelanjutan dan partisipatif.

Belajar dari RPP yang telah ada di beberapa daerah sebagaimana terungkap dari pernyataan Ketua KPU Banten Agus Supriyana, bahwa RPP dapat menjadi pusat kajian dan penelitian serta informasi tentang pemilu dan demokrasi. Seluruh masyarakat bisa belajar bagaimana sejarah demokrasi di Banten (pilarbanten.banten.com.indexphp.item ; diakses tanggal 7 Juni 2017). Sementara itu Ketua KPU Provinsi NTT Maryanti Luturmas Adoe menyatakan bahwa RPP di KPU Kota Kupang dibangun dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemilu kepala daerah (pilkada) dan kepemiluan, termasuk para pra pemilih seperti pelajar SD yang turut diundang untuk *launching* KPP karena dalam materi pembelajaran mereka ada materi tentang demokrasi dan pilkada (Belajar demokrasi dari RPP ; *timorexpress.com.fajar.co.id 2017/04-08* ; diakses tanggal 7 Juni 2017). Hal ini sesuai dengan pendapat Saha (2000) bahwa pada usia dini anak-anak Amerika, Inggris, dan Australia mulai memperoleh fondasi bagi pembelajaran politiknya. Lebih lanjut Peter mengemukakan penelitiannnya di tiga negara, yaitu Amerika, Denmark, dan Swedia tentang besarnya pengaruh pendidikan politik bagi tingkat partisipasi politik masyarakat terlebih pada anak-anak pra perintis (Dinesen, dkk., 2016).

 Setiap provinsi atau kabupaten/kota yang mendirikan RPP diharapkan mampu mencirikan RPP tersebut dengan karakter khusus daerah ataupun menggunakan kearifan lokal dalam mengedukasi masyarakat. Pendidikan dengan menggunakan kearifan lokal dikenal juga dengan *indigenous education. Indigenous education* adalah kegiatan pendidikan yang bersifat tradisional yang mengutamakan programnya diatas sadar nilai-nilai budaya sendiri dan dikembangkannya nilai-nilai budaya tersebut secara kreatif dan inovatif.

 Menurut Radmila (2011) kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Istilah kearifan lokal berasal dari *local genius* yang diperkenalkan oleh Quaritch Wales (1948-1949) dengan arti “kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan.” Kearifan lokal adalah tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat lokal *(indigenous people).* Fungsi kearifan lokal menurut Sartini (2006) diantaranya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan sumberdaya manusia dan juga bermakna politik seperti upacara ngakuk merana dan kekuasaan *patron-client.* Adapun model pembelajaran berbasis budaya dengan menggunakan kearifan lokal terdiri dari : (1) model pembelajaran berbasis budaya melalui permainan tradisional dan lagu-lagu daerah ; (2) model pembelajaran berbasis budaya melalui cerita-cerita rakyat yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat ; dan (3) model pembelajaran berbasis budaya melalui penggunaan alat-alat tradisional (Sutarno, 2008). Menumbuh-kembangkan berbagai jenis kearifan lokal dari masing-masing suku bangsa perlu dilakukan. Penelitian The Habibie Centre (2007-2009) tentang model demokrasi lokal di empat daerah termasuk daerah Sumbar menjelaskan temuannya bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti egaliter, musyawarah dan mufakat sangat berkontribusi membangun demokrasi lokal. Nilai-nilai lokal yang dulunya dominan dalam budaya Minang perlahan tercerabut dan kearifan lokal sebagai perangkat pengetahuan dan praktek-praktek luhur dari nenek moyang mulai ditinggalkan masyarakatnya.

 Satu contoh pembelajaran politik berbasis kearifan lokal adalah program *indigenous electoral participation* yang merupakan kerjasama terus menerus dari KPU dengan masyarakat lokal untuk mencapai kehidupan demokrasi yang lebih baik (Setiawaty, 2014). Artikel ini bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan bagaimana bentuk aktifitas (layanan) pendidikan politik khususnya pendidikan pemilih yang terdapat dalam RPP ; dan (2) merekonstruksikan model pengembangan RPP sebagai sarana pendidikan politik berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

**B. Metodologi.**

 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan *(Research and Development = R&D),* dengan menggunakan model ADDIE. Langkah awal dilakukan identifikasi bentuk aktifitas (layanan) pendidikan politik yang terdapat dalam RPP serta bagaimana manajemen pengelolaannya sehingga dapat memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik berkelanjutan. Kemudian dilakukan riset pengembangan dengan metode ADDIE dengan langkah-langkah berikut : (1) *analysis* ; (2) *design* ; (3) *development ;* (4) *implementation* ; dan (5) *evaluation* dalam mengungkapkan serta menganalisis model yang tepat untuk merekonstruksikan model pengembangan RPP sebagai sarana pendidikan politik berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

 Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu pedoman wawancara, *focus group discussion (FGD),* angket, dan instrumen validasi model oleh ahli yang terdiri dari Komisioner KPU, Bagian Teknis Sosialisasi KPU, ilmuwan politik, ilmuwan pendidikan politik, dan ilmuwan pendidikan itu sendiri. Metode pengembangan dianggap komprehensif karena pada setiap tahap dapat dievaluasi untuk penyempurnaan model (Morison, Ross dan Kemp, 2010). Sedangkan informan terdiri dari Komisioner KPU Provinsi Sumbar serta KPU Kota Bukittinggi bagian teknis dan hubungan masyarakat beserta staf yang bertanggungjawab secara teknis mengelola RPP.

**C. Hasil dan Diskusi Kajian.**

**1. Bentuk Aktifitas (Layanan) Pendidikan Politik Pada Rumah Pintar Pemilu.**

 RPP adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas proyek edukasi masyarakat. Dengan demikian bentuk aktifitas (layanan) pendidikan politik pada RPP merupakan serangkaian kegiatan pendidikan politik melalui pemanfaatan ruang yang ada pada RPP tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat ruang yang dapat dimanfaatkan untuk aktifitas pendidikan politik yaitu : (1) ruang audio visual ; (2) ruang pamer/display alat peraga/infromasi kepemiluan/demokrasi ; (3) ruang diskusi ; dan (4) ruang simulasi. Keempat ruangan tersebut memfasilitasi proses pemebelajaran politik. Ruangan audio visual dimanfaatkan untuk penayangan film-film yang menyangkut pemilu nasional dan pemilu lokal. Pembuatan film-film lokal dengan bentuk animasi dapat dijadikan sarana pembelajaran politik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Harisson dan Hummel (2010) bahwa kecenderungan siswa lebih menyenangi film animasi. Film animasi mampu memperkaya pengalaman dan kompetensi siswa pada beragam penyajian materi. Materi-materi yang disajikan melalui tayangan film/video berdampak pada motivasi siswa dalam berpartisipasi pada pemilu atau kehidupan demokrasi.

 Selanjutnya temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa belum ada film yang diproduksi khusus sesuai dengan konten pemilu lokal. Sementara itu ruang pamer/display alat peraga/informasi kepemiluan memuat tentang sejarah, sistem, peserta dan tahapan serta pentingnya pemilu. Disamping itu juga terdapat maket/diorama tentang tata cara pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Aktivitas pendidikan politik pada ruangan ini sangat tergantung dengan bentuk media yang disediakan. Informasi politik tentang pemilu dan demokrasi akah efektif apablia pada RPP tersebut juga membuat media lokal yang menarik pengunjung seperti sejarah pemilu di Kota Padang, dan pepatah-petitih tentang pemilu yang dapat dipahami masyarakat lokal. Demikian juga pada ruangan simulasi. Tidak hanya menyajikan proses pemilihan di TPS tetapi simulasi dilengkapi dengan nilai-nilai lokal pada proses pemilihan itu sendiri seperti pemilu badunsanak di Kota Padang atau Provinsi Sumatera Barat khususnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Carrie Antal dan Antal dan Peter Easton (2009) bahwa keterlibatan warganegara dalam proses menuju demokrasi dipraktekkan dalam budaya mereka pada pendidikan formal dan informal. Hal ini menginspirasi sekolah-sekolah bahwa praktek-praktek yang ada pada tradisi/budaya sangat cocok untuk penguatan dan penyebaran pengetahuan kewarganegaraan termasuk di dalamnya tentang informasi politik. Hal senada diungkapkan oleh Charlene Tan (2008) bahwapembuat kebijakan perlu memperkenalkan keefektifan pengajaran dan pembelajaran moral kewarganegaraan dengan dukungan nilai-nilai lokal termasuk nilai-nilai keagamaan yang ada dalam masyarakat.

 Kemudian ruang diskusi menjadi ruangan yang memiliki peluang untuk melakukan pendidikan politik yang lebih mendalam. Ruangan ini dapat dimanfaatkan untuk diskusi-diskusi publik bagi pegiat demokratisasi. Temuan penelitian menunjukkan banyak aktifitas yang dapat dilakukan pada keempat fasilitas yang ada pada RPP. Aktifitas pada ruang display memerlukan layanan *“guiding”. Guide* atau penyuluh akan memberikan informasi pada pengunjung. Bila penyuluh dapat menyajikan informasi dengan jelas dan menarik tentu akan menambah minat pengunjung pada RPP. Pengaruh informasi yang disajikan akan berakibat pada perilaku masyarakat terhadap fenomena politik. Fowler A. dan Margolis M. (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa informasi politik berpengaruh pada sikap warganegara terhadap partai-partai di Amerika Serikat. Ketika warganegara yang kurang informasi menerima informasi publik maka mereka secara otomatis menggeser preferensi politiknya.

 Disamping adanya layanan *guide* maka bentuk lain pelayanan di RPP berupa mengundang sekolah-sekolah melalui kerjasama dengan dinas pendidikan setempat. RPP juga dijadikan sarana pembelajaran bagi siswa-siswa sekolah menengah atau pun pemilih pemula. Hal ini sejalan dengan pengungkapan Pacho (2014) bahwa mempelajari informasi politik akan memungkinkan siswa untuk menghargai bagaimana pemerintah diorganisir, bagaimana mereka bekerja, bagaimana warganegara bisa berinteraksi dengan pemerintah, serta memanfaatkan berbagai kesempatan untuk berpartisipasi dan mengembankan sikap positif terhadap politik. Sementara Rong Yu (2012) dalam peneltiannya terhadap para mahasiswa membuktikan bahwa pendidikan politik dapat meningkatkan kadar ideologikal mahasiswa, kualitas psikologis dan bermanfaat untuk menyusun karir yang lebih baik. Para ahli juga meyakini bahwa warganegara yang memiliki pengetahuan merupakan prasyarat bagi kondisi berfungsinya demokrasi di suatu negara (Grofman, 1995).

**2. Model Pengembangan RPP Sebagai Sarana Pendidikan Politik Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal.**

 Pendidikan politik tidak serta merta terinternalisasi pada diri setiap individu masyarakat. Oleh sebab itu perlu didesain pendidikan politik berkelanjutan yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan secara berkesinambungan pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Untuk mengkonstruksikan model pengembangan RPP sebagai sarana pendidikan politik berkelanjutan berbasis kearifan lokal perlu digunakan metode ADDIE secara utuh.

 Pada tahap *analysis,* temuan penelitian menunjukkan beberapa hal yang perlu dikembangkan yaitu :

*Pertama,* persoalan aktifitas pendidikan politik yang dilakukan pada RPP. Walaupun RPP hanya memuat empat sarana pembelajaran, namun pemanfaatannya dapat ditingkatkan seperti membuat web khusus untuk pembelajaran politik yang ada pada RPP. Di dalam web tersebut terjadi interaksi antara pengelola dengan pengguna. Hal tersebut dapat dijadikan sarana pemberian kritik dan masukan. Sebagaimana dikemukakan oleh J. Sanchez-Vilar, E. Bigne, J. Aldas-Manzano (2017) bahwa melalui weblog tersedia sarana untuk memberikan pengaruh pada area politik dan sebagai yang utama adalah perannya dalam memberikan kritik. Dalam penelitian J. Sanchez, dkk. Diambil 39 weblog sebagai sampel dan 890 pengguna blog diminta tanggapannya terhadap peranan internet (dalam hal ini blog) sebagai alat utama dalam memberikan masukan di arena politik.

 Upaya lain yang dilakukan untuk mengembangkan RPP dalam bentuk aktifitas pendidikan politik melalui model pembelajaran berbasis budaya seperti permainan tradisonal atau pun melalui permainan yang lazim dalam masyarakat, seperti permainan ular tangga pemilu, teka-teki pemilu, atau pun acak kata pemilu.

*Kedua,* persoalan manajemen pengelolaan dan sumberdaya manusis yang tersedia pada RPP. Manajemen pengelolaan RPP menjadi faktor yang menentukan tumbuhkembangnya RPP sebagai salah satu pusat sumber belajar politik. Menurut Mudhofir (1992) untuk mengembangkan sebuah pusat sumber belajar harus melakukan tiga hal yaitu : (1) melakukan analisis kebutuhan ; (2) mengembangkan sarana fisik ; dan (3) mengembangkan program-program. Sedangkan prinsip-prinsip pengelolaannya berpijak pada empat hal yaitu : (1) prinsip pengelolaan pusat informasi, yang ditujukan untuk siapa, bagaimana, dan apa konten informasi yang dibuat ; (2) prinsip pengelolaan layanan, sangat tergantung pada kualitas aktivitas dan petugas layanan ; (3) prinsip pengelolaan pengembangan instruksional sangat tergantung pada kemampuan membuat *need assessment,* memilih sumber belajar, mengevaluasi, dan mengembangkan program instruksional ; dan (4) prinsip pengelolaan produksi yang berhubungan dengan penyediaan materi atau bahan instruksional. Kemudian setelah ditetapkan analisis kebutuhan berdasarkan FGD, angket dan *indepth interview* dilakukan tahap kedua yaitu tahap desain. Pada tahap ini dilakukan hal-hal yang sudah menjadi kebutuhan yaitu : (1) merancang aktifitas pendidikan politik berbasis kearifan lokal untuk layanan pada RPP ; dan (2) merancang standar operasional kegiatan RPP, struktur pengelolaan dan layanan pengembangan program instruksional.

 Oleh sebab itu sebagai langkah awal pengembangan RPP dibutuhkan standar operasional kegiatan RPP, struktur pengelola dan layanan pengembangan program instruksional atau pun bagaimana menyediakan materi atau bahan sumber belajar. Menurut Romiszowski (1986) pengembangan bahan ajar sebagai sumber belajar sangat tergantung pada empat aspek yaitu : (1) aspek akademik ; (2) aspek sosial ; (3) aspek rekreasi ; dan (4) aspek pengembangan prodi. Sementara itu Tomsilon (1998) menjelaskan langkah-langkah pengembangan bahan ajar yaitu : (1) mengidentifikasi kebutuhan materi ; (2) mengeksplorasi kondisi lingkungan wilayah tempat bahan ajar yang akan digunakan ; (3) menentukan masalah atau topik yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lingkungan peserta didik ; (4) memilih pendekatan, latihan atau aktifitas serta pendekatan prosedur pembelajaran ; dan (5) menulis rancangan materi bahan ajar.

 Materi ajar yang didesain dengan memperhatikan nilai-nilai lokal/setempat hendaknya menjadi dasar dalam penyajian materi di RPP. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan lokal/setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Radmila, 2011). Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah dan terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya masalah pengembangan RPP yang menyangkut sumberdaya manusia, Temuan penelitian menunjukkan perlu dipersiapkan pelatihan untuk *guide* pada RPP yang ada. Sementara ini belum terdapat petugas khusus yang disediakan untuk memberikan layanan informasi pada pengunjung.

 *Ketiga,* menyangkut membangun jejaring (relasi). RPP akan efektif dimanfaatkan apabila melibatkan banyak pihak terkait seperti : (1) membangun jaringan dengan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Guru PPKn dapat memanfaatkan RPP sebagai pusat sumber belajar politik bagi siswa. Sebaliknya guru PPKn dapat pula dilatih sebagai *guide* bagi RPP ; (2) membangun kerjasama dengan *stakeholder* melalui publikasi kegiatan dan bantuan pengembangan RPP. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan pihak swasta berperan besar dalam pengembangan RPP. Sebagaimana yang terjadi di Chili bantuan pihak swasta pada masa transisi memberikan pengaruh berarti bagi keberlanjutan pendidikan politik di negara tersebut ; (3) membangun kerjasama dengan semua penggiat demokrasi. Hal ini bertujuan untuk menjadikan RPP sebagai tempat bagi penggiat demokrasi untuk mengemukakan ide, tempat belajar dan meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi lokal yang lebih baik. Tahap ketiga adalah tahap pengembangan yang berupa : (1) mengkonstruksikan model pengembangan layanan RPP sebagai sarana pendidikan politik berkelanjutan berbasis kearifan lokal ; (2) mengembangkan buku pedoman materi pendidikan politik dan pembelajarannya ; dan (3) mengembangkan buku panduan evaluasi RPP yang menyangkut panduan evaluasi penyelenggaraan pendidikan politik pada RPP dan evaluasi terhadap pengelolaan RPP.

 Belajar bersama di RPP dapat meningkatkan keaktifan warganegara untuk berpartisipasi dalam politik. Karakteristik warganegara yang aktif yang dimaksud antara lain sadar akan hak dan kewajiban politiknya, memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi. Salah satu upaya untuk menjadi warganegara yang aktif adalah dengan pembelajaran melalui pengalaman *(learning by experience)* dengan cara diskusi-diskusi publik atau pun belajar bersama dengan penggiat demokrasi seperti organisasi non pemerintah *(non-geovernmental organizations = NGO’s)* (Ribeiro, 2012). Pada tahap implementasi dan evaluasi belum dilaksanakan karena pada artikel ini baru merupakan penjabaran tiga tahapan dari model ADDIE. Dari keseluruhan temuan menunjukkan bahwa pada model yang dikonstruksikan dijadikan langkah awal untuk mengembangkan RPP sebagai pusat sumber belajar politik.

 Lebih lanjut menurut Westheimer dan Kahe (2004) pembentukan proses pendidikan politik dan kewargangeraan yang berhasil ditandai oleh: (1) *personality responsible citizens,* yaitu kemauan untuk mematuhi hukum, bergotong royong sampai dengan solidaritas sosial ; (2) *participatory citizens* yang dicirikan kemauan untuk atif berkomunitas dan mengetahui strategi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama ; (3) *justice-oriented citizens* yang ditandai oleh kemampuan secara kritis menilai sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

**D. Penutup.**

 Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggungjawab secara etis dan mencapai tujuan-tujuan politik bangsa. Pendidikan politik berkelanjutan berbasis kearifan lokal melalui RPP dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sarana pembelajaran politik yang terintegrasi dan dapat meningkatkan kemelekwacanaan politik warganegara sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Aktifitas pendidikan politik yang terdapat dalam RPP perlu dikembangkan dengan standarisasi pelayanan dan sarana prasarana serta manajemen pengelolaan yang lebih efektif.

**E. Daftar Pustaka.**

Antal, Carrie & Peter Easton. (2009). Indigenezing Civic Education in Africa : Experience in Madagascar and the Sahel. *International Journal of Educational Development 29,* 599-611.

Dinesen, Peter Thisted, et al. (2016). Estimating the Impact of Education on Political Participation : Evidence from Monozygotic Twins in the United States, Denmark and Sweden. *Polit Behav DOI 10.1007/s11109-015-9328-2.*

Fowler A. & Margolis M. (2014). The Political Consequences of Uniformed Voters. *Electoral Stuides, 34.* 100-110. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.09.009>

Grofman, Bernard. (1995). *Information, Participation, and Choice : An Economic, Theory of Democracy in Perspective.* University of Michigan.

Haris, Syamsuddin. (2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Harrison, Henry L. & Hummel, Laura J. (2010). *Incorporating Animation Concepts and Principles in STEM Education.* USA : The Technology Teacher.

J. Sanchez-Vilar, E. Bigne, J. Aldas-Manzano. (2017). Blog Influence and Political Activism : An Emerging and Integrative Model. *Spanish Journal of Marketing-ESIC (2017, 1-15),* [*http://dxdoi.org.sjme*](http://dxdoi.org.sjme) *2017.*

Morisson, Ross, Kalman & Kemp. (2010). *Designing Effective Instruction.* USA : Acid Free Paper.

Mudhofir. (1992). *Prinsip-prinsip Pengelolaan Pusat Sumber Belajar.* Bandung : Rosdakarya.

Pacho, Titus O. (2014). Necesssity of Political Education. *International Journal of Innovative Research and Studies 3 (11),* 10-16.

Radmila, Sasmita. (2011). *Kearifan Lokal : Benteng Kerukunan.* Jakarta : Gading Inti Prima.

Rafni, Al dan Suryanef. (2016). *Pengembangan Model Pelatihan Relawan Demokrasi Sebagai Fasilitator Pendidikan Politik Berbasis Komunitas (Studi Terhadap Relawan Demokrasi Pemilu 2014 di Kota Padang).* Laporan Penelitian – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang.

Ribeiro, Ana Bela, Mariana Rodrigues, Andreia Caetano, Sofia Pais & Isabel Menezes. (2012). Promoting Active Citizens? The Critical Vision of NGO’s as an Educational Priority Across Europe. *International Journal of Progressive Education 8 (3),* 32-47.

Romiszwoski, A.J. (1986). *Producing Instructional Systems : Lesson Planning for Individualized and Group Learning Activities.* Oxon : Routtledge Falmer.

Rong Yu. (2012). “The Research of How to Effective Implementation The Political Education in Employment Guidance for University Students”. *Procedia IERI 2012, pp.238-242.* www.elsevier.com/locate/procedia

Saha, L. (2000). “Political Activism and Civic Education Among Australian Secondary School Students. *Australian Journal of Education 44 (2),* 155-174.

Sartini. (2006). “Menggali Kearifan Lokal Nusantara : Sebuah Kajian Filsafati” dalam [*http://filsafat.ugm.ac.id*](http://filsafat.ugm.ac.id)diakses tanggal 14 Juni 2017.

Setiawaty, Diah. (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik. *Jurnal Islamic Review III (1), April 2014.*

Sutarno. (2008). *Penidikan* *Multikultural.* Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Ketenagaan.Departemen Pendidikan Nasional.

Tan, Charlene. (2008). Two Views of Education : Promotong Civic and Moral Values in Cambodia Schools. *International Journal of Educational Development 28,* 560-570.

Tomsilon, Brian (ed). (1998). *Material Development in Language Teaching.* Cambridge University.

Westheimer, J. & Kahne, J. (2004). “What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. *American Educational Research Journal 41 (2),* 237-269.